

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
KALE'O KECEMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

MELATI PUTRI
NIM.217130075

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA KALE'O KECEMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Disusun dan diajukan oleh :

MELATI PUTRI
NIM. 217130075

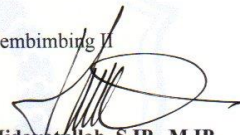
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Drs. Mintasrihardi, M.M.
NIDN. 0830016101

Pembimbing II


Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 080938902

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIP: 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA KALE'O KECAMATN LAMBU KABUPATEN BIMA**

Di susun di Ajukan Oleh :

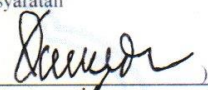


MELATI PUTRI
NIM.217130075

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 30 juli 2021

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

- | | | |
|--|---------------------|--|
| 1. <u>Drs. Mintasrihardi, MH</u>
NIDN.0830016101 | Tim Penguji
(PU) | () |
| 2. <u>Hidavatullah, S.IP., M.IP</u>
NIDN.0809038902 | (PP) | () |
| 3. <u>Drs. H. Mustamin H. Idris, MS</u>
NIDN.0031126484 | (PN) | () |

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram , 10 agustus 2021

Mahasiswa



Melati Putri
NIM. 217130075



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Putri
NIM : 211130075
Tempat/Tgl Lahir : Kale'o 02 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik
No. Hp/Email : 085 333 129 715 / Melati.Putri@gmail.com
Judul Penelitian : -

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya peningkatan
Kesejahteraan masyarakat di desa Kale'o kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Penulis



Melati Putri
NIM. 211130075

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melah Putri
NIM : 217130075
Tempat/Tgl Lahir : Kale'o 02 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085 333 124 715
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi program keluarga harapan (PKH) sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa kale'o kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Penulis



Melah Putri
NIM. 217130075

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah tetap belajar dan tak kenal putus asa”

“Menunda skripsi sama halnya menunda senyum orang tua”

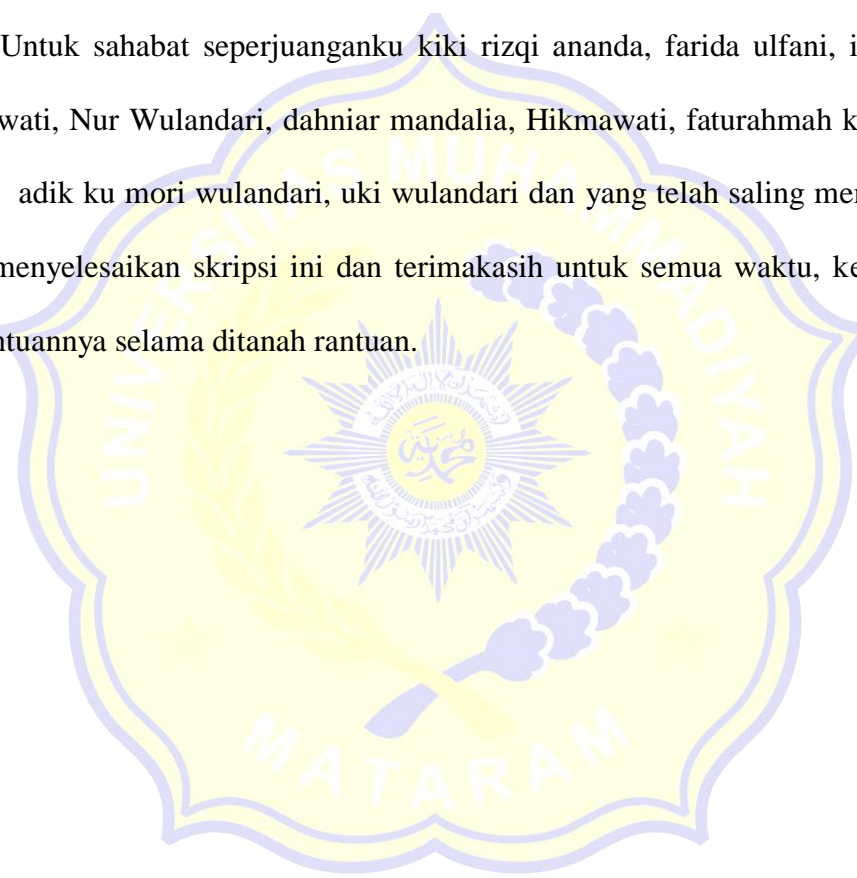


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada ke dua orang tua tersayang bapak hasanuddin dan ibu masita yang telah membesarkanku denga penuh kasih sayang, yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan penuh dalam hidup ini. Terimakasih atas doa yang kalian panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan anak mu ini.

Untuk sahabat seperjuanganku kiki rizqi ananda, farida ulfani, imansya, Rahmawati, Nur Wulandari, dahniar mandalia, Hikmawati, faturahmah kakak lili suryani adik ku mori wulandari, uki wulandari dan yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk semua waktu, kenangan, dan bantuannya selama ditanah rantuan.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PKH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2020 DI DESA KALE'O KECEMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

OLEH :

MELATI PUTRI

NIM. 217130075

Kemiskinan yang dihadapi pemerintah menjadi masalah penting dan memerlukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan, dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan program khusus yang di berinama program keluarga harapan (PKH) sala satu program pencampain penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam upaya menunngkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implentasi program PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa kale,o kecamatan lambu kabupaten bima. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Narasumber penelitian ini terdiri dari pendamping PKH, Kepala desa dan peserta PKH. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, obsevasi, dan dokumentasi dan teknik penentuan informasi menggunakan *snownall sampling* dan *pourposive sampling*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu: (1) , implentasi program PKHsebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang ditetap oleh Kemensos RI melalui data terpadu. Penerpan program PKH mampu mengurangi angka kemiskinan, masyarakat mengalami peningkatan kualitas hidup dari segi kesehatan pendidikan dan ekonomi.(2) proses penyaluran informasi belum efektif

dan informasi yang diterima belum jelas, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang PKH dan sumber daya, pendamping pkh sudah memadai dengan jumlah satu orang pendamping yang bertanggung jawab atas 97 penerima manfaat bantuan PKH yang menyebar kurang optimalisasi implementasi PKH di desa kale.o yang diharapkan mampu meningkatnya ekonomi masyarakat

Kata Kunci : Implementasi , PKH, Kesejahteraan.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PKH PROGRAM AS AN EFFORT TO
IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN 2020 IN KALE'O VILLAGE,
LAMBU, BIMA

BY:

MELATI PUTRI
NIM. 217130075

Poverty requires necessitates efforts to alleviate it by the government. To this end, the government offers a special program called the Family Hope Program (PKH), which is a poverty reduction program that provides conditional cash assistance to very poor households (RTSM) in order to improve the quality of human resources in the fields of health and education. The goal of this study was to describe how the PKH program was implemented in Kale,o Village, Lambu, Bima, in order to promote the welfare of the poverty. This thesis was written utilizing qualitative research methodologies. PKH facilitators, village leaders, and PKH participants served as resource persons for this study. Interviews, observation, and documentation were used to collect data, and information was determined using snowball sampling and purposive sampling procedures. The following conclusions can be taken from the study's findings: (1) the PKH program was implemented in an effort to improve community welfare in accordance with the processes and provisions established by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia using integrated data. The PKH program has been able to reduce poverty, and the community's quality of life has improved in terms of health, education, and economics, (2) because the information dissemination process has been ineffective and the information obtained has been unclear, many people are unaware of PKH and its resources and facilitators. PKH is sufficient with one companion who is accountable for 97 PKH beneficiaries, spreading the lack of optimization of PKH implementation in Kale'o village, which is projected to boost the community's economy.

Keywords: *Implementation, PKH, Welfare.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah pada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas dan kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 Di Desa Kale’o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan tuntutan tuhan yang maha esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Beserta Jajarannya.

3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Mintasrihardi, M.M selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak/ ibu para karyawan dan staf TU di fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pelayanan selama masa perkuliahan.
8. Kepada teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang tercinta, suka duka dan kebersamaan yang kita lalui semoga menjadi kenangan yang terindah.

Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Mataram, 2021

Melati Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISONALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABLE	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Konsep Kebijakan Publik	11
2.2.1 Kebijakan Publik	11
2.2.2 Analisis Kebijakan Publik	12
2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	14
2.2.4 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan	19
2.3 Kemiskinan	23

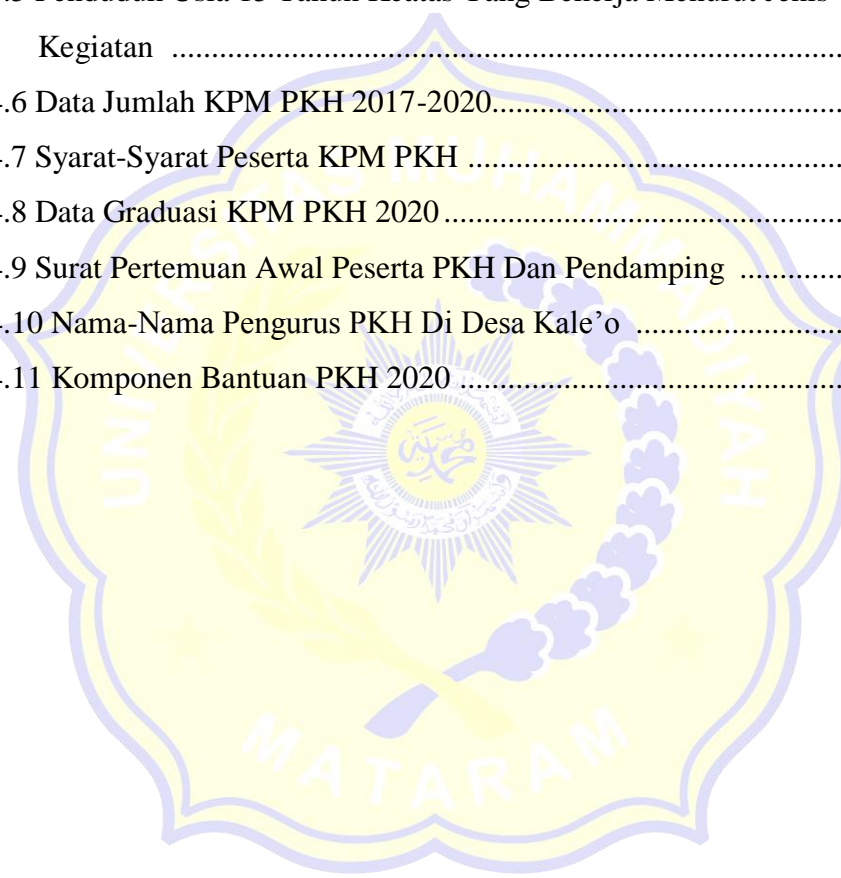
2.3.1 Definisi kemiskinan	27
2.3.2 Indikator Kemiskinan	30
2.4 Teori Pemberdayaan	32
2.4.1 Pengembangan Masyarakat	36
2.5 Pendamping	39
2.6 Program Keluarga Harapan (PKH)	41
2.6.1 Kesejahteraan Masyarakat	43
2.6.2 Aspek Kesejahteraan Sosial	45
2.7 Kerangka Berpikir	47
2.8 Definisi Konseptual	47
2.9 Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
1.1 Metode Penelitian	49
1.2 Lokasi Penelitian	49
1.3 Waktu penelitian	50
1.4 Tehnik Penentuan Informan	50
1.5 Fokus Penelitian	50
1.6 Sumber Data	51
1.7 Tehnik Pengumpulan Data	51
1.8 Tehnik Analisa Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kale'o	55
4.2 Implementasi Program PKH Dalam Mengurangi Angka kemiskinan	62
4.2.1 Pengembangan Masyarakat	63
4.2.2 Monitoring	67
4.2.3 Fasilitator	74
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi program PKH Sebagai Upaya peningkatan Kesejahteraan Mayarakat	77
4.3.1 Komunikasi	77

4.3.2 Sumber Daya	81
4.3.3 Disposisi	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.8 Penentuan Informan	54
Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Kale'o 2020	60
Tabel 4.2 Luas Dusun, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	60
Tabel 4.3 Nama-Nama Aparatur Desa Kale'o 2020	62
Tabel 4.4 Struktur Perekonomian Desa Kale'o 2019-2020	63
Tabel 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan	64
Tabel 4.6 Data Jumlah KPM PKH 2017-2020.....	64
Tabel 4.7 Syarat-Syarat Peserta KPM PKH	68
Tabel 4.8 Data Graduasi KPM PKH 2020	72
Tabel 4.9 Surat Pertemuan Awal Peserta PKH Dan Pendamping	80
Tabel 4.10 Nama-Nama Pengurus PKH Di Desa Kale'o	86
Tabel 4.11 Komponen Bantuan PKH 2020	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Berpikir	50
Gambar 2.8 Pengambilan Kesimpulan	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi pemerrintahan.....	61
Gambar 4.2 Kartu Peserta PKH	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di seluruh Provinsi di Indonesia. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat Tidak terkecuali di negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah di antaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Oleh karena itu perlu adanya upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah dibidang sosial ekonomi khususnya adalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang di beri nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2017.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Todaro dalam Wrihatnolo (2002;77) yang menyatakan bahwa :Pembangunan di negara berkembang selalu di latar belakanginya oleh permasalahan keterbelakangan, Kemiskinan dan pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang

tidak luput dari permasalahan kemiskinan tersebut. Bahkan permasalahan kemiskinan budaya dan terjadi akibat proses pemiskinan struktural.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan program khusus yang di beri nama Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan hal tersebut implementasi program keluarga harapan yang terdapat di desa kale'o ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Program PKH di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan di harapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambung, setidaknya hingga tahun 2015. Diharapkan implementasi dari program PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan..

Untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pemerintah khususnya kementerian sosial RI (kemensos) memiliki berbagai program penangulangan kemiskinan mulai dari penangulan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program yang berbasis bantuan sosial dari pemerintah adalah program keluarga harapa (PKH). Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No.1o tahun 2017 pasal 2 bahwa program keluarga harapa (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah ole pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Banyak yang menilai bahwa program pemerintah tidak efektif, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT yang di gagas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dinilai hanyalah program yang tidak dapat mencerdaskan masyarakat karena program BLT yang langsung memberikan uang tunai tanpa tahu akan diapakan uang tersebut oleh penerima bantuan. BLT tidak berhenti sampai disitu saja, mengenai penggunaan data kemiskinan yang menjadi acuan masih tidak valid, terbukti masih banyak warga miskin tidak tersentuh oleh program ini.

Data penerima manfaat program keluarga harapan (PKH)menjadi sorota masyarakat, pasalnya, banyak ditemukan orang kaya yang menjadi penerima manfaat program . Sebaliknya masyarakat miskin yang berhak belum bisa menikmati keberadaan program.Kepada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui kabit perlindungan dan jaminan sosial, Mirajuddin membenarkan hal tersebut.menurutnya banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang duluhnya masuk kategori tidak mampu sekarang mengalami peningkatan status ekonomi. Namu mereka masih terdata sebagai penerima manfaat.Hal tersebut juga di benarkan oleh salah satu warga penerima bantua PKH yang kini telah mengalami peningkatan ekonomi, Seharusnya pemerintah melakukan sistem pendataan secaraakurat dan tepat bagi penerima PKH agar bantuan tersebut tepat pada sasaranya yaitu masyarakat miskin.Masyarakat juga harus ikut melaporkan dan mengawasi jalannya pendataan masyarakat penerima

Program Keluarga Harapan(PKH) agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan masyarakat penerima bantuan PKH karena selama ini banyak sekali orang mampu yang terdaftar namanya sedangkan yang tidak mampu tidak terdaftar hal inilah yang patut kita awasi bersama-sama. Agar terciptanya masyarakat yang sejahtera karena program bantuan ini. (<http://samotamedia.com>)

Penelitian ini di fokuskan kepada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat sangat miskin yang membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Program (PKH) ini harus dilakukan secara profesional sehingga tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari program PKH tersebut, seharusnya program (PKH) benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkan sehingga adanya program PKH ini masyarakat akan merasa beban kehidupannya berkurang. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 di Desa Kale’o **Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.**”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Implementasi Program (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di desa Kale’o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tahun 2020?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program (PKH) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di desa kale'o kecamatan lambu kabupaten bima pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program PKH sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di desa kale'o kecamatan lambu kabupaten bima.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

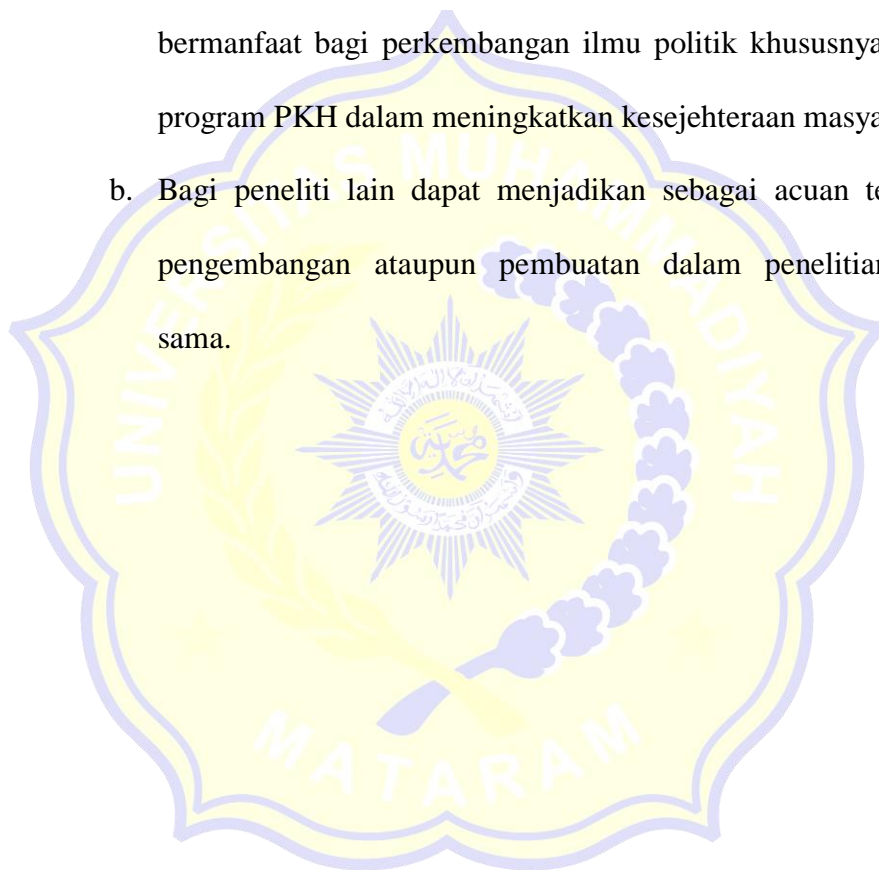
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

3. Manfaat akademis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik khususnya dalam program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Dalam penelitiannya Dewi walahe (2019) dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendampingprogram keluarga harapan” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) kecamatan belum optimal. Hal ini terutama terlihat darikomunikasi, setelah melakukan penelitian bahwa komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Kesenapadang masih belum maksimal. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduksehingga informasi tentang program keluarga harapan sampai ke pelosok-pelosok desa. Sumber daya sudah cukup baik namun dalam hal ini sumber daya manusiaperlu ditingkatkan lagi. Disposisi dalam ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan. Struktur birokrasi masih terkendala dalam aspek fragmentasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan maupun pelaksana program ini.
2. Dalam penelitiannya Slamet riyadi (2016) dengan judul “analisis implentasiprogram keluarga harapan (PKH) terhadap keluarga

sangat miskin (KSM)penerima bantuan (studi kasus di kecamatan gunung sugih lampung tengah)”dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Implentasi PKH di Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2011-2014 meliputi:aspek input berupa penetapan rumah tangga sasaran (RTS) aspek proses berupa kegiatan pertemuan awal dan validasi,pembukaan,kelompok dan pemutahiran data serta aspek output berupa verifikasi komitmen,dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan PKH salah satu faktor pendukung implentasi meliputi : Aspek *communication* berupa dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, aspek *dispotitions* berupa kebijakan alokasi dana *sharing* PKH serta aspek *resources* berupa komitmen dan kapabilitas implementor program. Hambatan Implentasi dengan cara penetapan rumah tangga sasaran (RTS) akibat sumber data yang tidak akurat. Pemutahiran data akibat tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif,keterlambatan verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang optimal. Kualitas PKH dinilai lebih baik jika dibandingkan bantuan langsung lainnya seperti PSKS/BLSM.

3. Dalam penelitiannya Shellayulia rosalina (2018)dengan judul ”Pelaksana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”dalam penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Galiyah Kota Semarang yakni sebagai berikut : 1. target penetapan sasaran calon penerima PKH 2.penetapan lokasi penerima

program keluarga harapan 3.proses persiapan pertemuan awal dan validasi
4.penyaluran bantuan 5.pembentukan kelompok peserta program keluarga
harapan 6.verifikasi komitmen 7.penanguhan dan pembatalan
8.pemuktahiran data. Hal tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya
Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi kemiskinan di
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,meskipun pencapaiannya belum
maksimal.

4. Dalam penelitiannya Syahriani (2016) dengan judul “Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan RTSM terhadap PKH bahwa rumah tangga sangat miskin telah mengetahui pengertian,tujuan, dan kepesertaan PKH. Kontribusi prograam keluarga harapan (PKH) dalam pendidikan siswa kurang mampu di Desa Mariomarioja Kecamatan Marioriwawo Kabupeten Soppeng adalah pemberian uang tunai kepada Peserta Program Keluarga Harapa (PKH) untuk biaya pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin. Pemberian bantuan ini mampu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM),dan anak-anak rumah tangga sangat miskin dapat menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun,dan peningkatan kehadiran siswa di sekolah.
5. Dalam penelitiannya Kartiawati (2017) dengan judul “Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan ditinjau dari prespektif ekonomi islam” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

efektivitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di kampung Bonglai, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : tidak tepatnya penerimaan bantuan dalam mengelola /mengalokasikan dana yang di terima. Sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di kampung Bonglai masing kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di kampung bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum terdata oleh PKH.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	NAMA TAHUN	JUDUL	OBJEK DAN TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Dewi walaha (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pendamping program keluarga harapan	Menggunakan metode kualitatif.	Implementasi program keluarga harapan (PKH) kecamatan belum optimal. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi informasi tentang program keluarga harapan harus sampai ke pelosok-pelosok desa. sumber daya sudah cukup
2	Slamet riyadi (2016)	Analisis implementasi program keluarga sangat miskin (KSM) penerima bantuan (tesis)	(Studi Kasus di kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah) Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Implementasi PKH di kecamatan gunung sugih tahun 2011-2014 meliputi: aspek input berupa penetapan rumah tangga sasaran (RTS) aspek proses berupa kegiatan pertemuan awal dan validasi, pembukaan, kelompok dan pemutakhiran data serta aspek output berupa verifikasi komitmen, dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan PKH

3	Shella yulia rosalina (2018)	Pelaksanaan program PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan	(studi kasus di kecamatan purwoasari,kabupaten kediri) menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Proses pelaksanaa program keluarga harapan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kecamatan galiyah kota semarang yakni sebagai berikut:target penetapan sasaran calon penerima PKH penetapan lokasi penerima program keluarga harapan proses persiapan pertemuan awal dan validasi penyaluran bantuanpembentukan kelompok peserta program keluarga harapan verifikasi komitmen penanguhan dan pembatalan pemuktahiran data.
4	Syahrhani (2016)	Kontribusi program keluarga harapan dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu	(Studi kasus di kota batu) menggunakan metode deskriptif kualitatif	Pemberian bantuan agar mampu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan anak-anak rumah tangga sangat miskin dapat menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun, dan peningkatan kehadiran siswa di sekolah.
5	Kartiawati (2017)	Analisis efektifitas program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di tinjauh dari prespektif ekonomi islam	(Studi kelurahan loktabat selatan) menggunakan metode penelitian kualitatif	Tidak tepatnya penerimaan bantuan dalam mengelola /mengalokasikan dana yang di terima. sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di kampung bonglai masing kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di kampung bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum terdata oleh PKH.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya

adalah perbedaan judul yaitu penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi

adalah bagaimana dalam implementasi PKH terhadap keluarga sangat miskin

dan menggunakan metode (tesis), Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak menggunakan (tesis). Perbedaan lainnya juga terletak pada jenis penelitian,tempat atau lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Kebijakan publik

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtias (2014;8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”.

Seseorang ahli jerman lainnya,Crinson dalam ayuningtias (2014;8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik ataupun konkret, sehingga pendefinisannya akan menghadapi banyak kendala atau denga kata lainya tidak mudah. Selanjutnya Crinon juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaatapabilah dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan yang saling berhubungan satu sama lainya.

Menurut fedrich dalam agustino (2017;166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang disusun oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu, Adson dalam Agustino (2017;17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang bergabung dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan suatu kesatuan. Menurut Dun dalam Ayuningtyas (2014;15) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbak balik dari tiga unsur yaitu kebijakan publik, perilaku dan lingkungan kebijakan.

2.2 2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan kajian yang tidak tertutup pada kajian di sektor publik saja, karena sektor privat pun pada banyak hal memanfaatkan metode-metode analisis kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Setidaknya ada tiga hal

yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lazim dikenal pada sektor publik, yaitu :

1. Sektor publik secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih ketimbang sektor privat. Artinya, sektor publik yang terdiri banyak aktor dan kepentingan membutuhkan metode yang lebih lengkap untuk menyelesaikan masalah yang di hadapinya.
2. Sektor publik memiliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi. Artinya aktor publik lebih memiliki untuk mendapatkan masalah-masalah baru dari kondisi yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Kejadian seperti ini lebih dimiliki oleh sektor publik ketimbang sektor privat.
3. Sektor publik memiliki ruang masalah yang lebih luas ketimbang sektor privat. Artinya, pemerintah membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih memiliki cakupan luas, dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks ketimbang analisis kebijakan yang dimiliki oleh sektor privat.

Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik devinisi seperti ini maka analisis kebijakan merupakan kajian yang dapat diadopsi oleh institusi publik maupun privat.

Analisis kebijakan mungkin masih amat jarang disebut sebagai sebuah profesi dinegeri ini. Sebutan analisis kebijakan memang baik jika itu menyebutkan sebuah keahlian yang disandang oleh seseorang. Tetapi, jika maksudnya membangun imej analisis kebijakan adalah sebuah profesi yang harus dihargai dengan uang, maka nampaknya itu telah bertentangan dengan etika dari analisis kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan menginginkan agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kliennya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Study kebijakan publik didefinisikan sebagai studi tentang jenis dan karakteristik, sebab-sebab, dan akibat dari kebijakan publik. Secara sadar studi kebijakan publik bisa dibedakan menjadi 5 tipe yaitu,

1. Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan,
2. Studi tentang aktor kebijakan
3. Studi implementasi
4. Studi evaluasi, dan
5. Analisis kebijakan

2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus bahasa indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

tersusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman (2002;70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Guntur setiawan, 2004; 39).

Van meter dalam agustino(2017;126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang arahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatan bahwa implentasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapka atau didefinisikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “ implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu, (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana dilapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai dan apa alasan menyebabkan keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) akan terfokus pada “tindakan pejabat dan intasi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”

Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005:64)

implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola kehidupanya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termaksud pendapatan mereka”. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi

kebijakan publik serta guna penyerdehanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi di akui sebagai individu / lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah di rencanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Beberapa studi implementasi menunjukkan bahwa aktor-aktor dapat melaksanakan kebijakan dengan keyakinan bahwa tindakan

mereka adalah sesuai dengan tujuan pengimplementasian walaupun terkadang mereka keliru atau melakukan kesalahan. Untuk menyatakan bahwa perspektif implementasi berhasil, diperlukan perspektif implementasi yang berbeda, dan itu adalah teoritis. Tetapi bila dikaji lebih dalam, sebagai konsekuensinya negara kesatuan, meskipun secara deklatoris hanya mengurus urusan seperti diatas, bukan berarti pemerintah melepaskan atau mendelegasikan sepenuhnya urusan lainnya kepada pemerintahan daerah. Pemerintah pusat masih memegang kendali kewenang tersebut, khususnya di bidang pengawasan dan pengendalian serta pendanaan.

Seperti isi rumusan pasal 10 ayat (5) UU No 32 tahun 2004 bahwa dalam urusan pemerintah yang terjadi kewenangan pemerintah diluar urusan sebagaimana dirumuskan pada ayat (3), pemerintah dapat : (1) menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintah, (2) melimpahkan sebagai urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, (3) menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah berdasarkan asas tugas pembantuan. Sama seperti UU 22/1999, juga UU No.32/2004, titik beratnya otonomi berada pada kabupaten dan kota adalah menerima kewenangan terbesar, sedangkan provinsi menerima kewenangan yang lebih bersifat koordinatif pengawasan dan pembinaan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. pertama, melindungi

keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan, jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat sumber dana bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sasaran berasal dari APBN. Penyaluran bantuan dilakukan empat tahap dalam setahun, yaitu bulan maret, juli, september dan desember.

Pembuatan keputusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidaklah terjadi secara berurutan, artinya proses kedua belum tentu dimulai ketika proses pertama selesai. Selesai proses implementasi berlangsung, proses pembuatan kebijakan (yang lebih operasional) terjadi. Tata niaga cengkeh misalnya, sejak diputuskan untuk dikelola oleh BPPC, diatur melalui berbagai keputusan menteri yang terus di perbaharui, masing-masing proses imlementasi kebijakan tata niaga tersebut berlangsung. Hal yang sama juga terjadi pada kebijakan pemerintah mengenai iuran TVRI waktu yang lalu.

Menurut Georgi Edward III dalam (Widodo 2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4)struktur birokrasi.

2.2.4 Faktor- faktor implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan (Winarno 2005: 101).

Nugroho (2019: 494) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Widodo (2001: 191) menyatakan bahwa, sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Fanmater dan fanhorn (Widodo 2001:192), menyatakan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Definisi

implementasi berikutnya diungkapkan Daniel Mazmanian *et al* (Agustino, 2006:153) yang mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi dari berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan dari para ahli diatas, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, sebuah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementasi kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

Ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Menurut van meter dan van ham (wahab 2012:165) faktor keberhasilan meliputi antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan secara jelas. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat tercapai. Ketika suatu kebijakan secara jelas, dengan tidak memiliki standar dan sasaran yang jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam pelaksanaannya.

2. Sumber-sumber kebijakan

Perlunya dukungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial.

3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

Dalam suatu implemrasi kebijakan karakteristik pelaksanaan harus tepat dengan kebijakannya yang mencakup struktur birokrasi. Nama-nama dan pola –pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan mempengaruhi implentasi suatu program kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijaka, karena itu komunikasi dan kordinasi merupakan hal yang penting agar hujun dan sasaran dapat tercapai.

5. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana di awali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas nama kebijakan itu di laksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan,antara lain terdiri dari pengetahuan,pemahaman dan

pendalaman terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan ketiga, karena tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan dan mungkin di karenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan, sebaliknya apabila sikap para pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan akan berhasil.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Makinde dalam agus dan ratna (2012;85) Faktor kegagalan proses implentasi kebijakan disebabkan oleh :

1. Kelompok sasaran tidak terlibat dalam implentasi program seaimana mungkin suatu implentasi program dapat berhasil apabila kelompok sasarannya tidak terlibat.
2. Program yang diimplentasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif serta masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

3. Adanya korupsi

Penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentifikasikan perilaku-perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kuasa atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

4. Sumber daya manusia yang kapasitasnya rendah

Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang tepat akan sulit merealisasikan tujuan-tujuannya.

5. Tidak adanya koordinasi dan monitoring

Kordinasi dan monitoring sangat penting diantara lembaga-lembaga pelaksana dan dengan penerima layanan.

2.3 Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermula pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Paradigma Neol-liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat kurang. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma Neo-liberal ini digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah penempatan nasional (GNP, yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang

menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (edi suharto, 2009,138).

2. Paradigma demokrasi

Pardigma ini tidak dapat melihat kemiskinan sebagai persoalan individu,melaikan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (Cheyne,O’Brien, 1998:79). Ketidak adilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang, mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinyakemiskinan.pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian yang paling efektif. (cheyne,O’Brien, 2005:79).

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (syahyuti, 2006 : 95). Kemandirian dalam kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan cukup. Kebebsan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilhan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-sansaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan –kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus melembaga .misalnya ditangani secara institusional (melalui lembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapat atau dana pensiun, akan meningkatkan kebebasan, hal ini dikarena tersedianya penghasilan dasar sehingga orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

- a. Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyakut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinanya. Pada point pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dan program-program anti kemiskinan.
- b. Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
- c. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan
- d. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian (*livelihood capabilities*), memenuhi

kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelolah asset (*assetmanagement*), memenuhi jangkauan sumber-sumber (*access to resource*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya manusia sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelolah aset, menjakuan sumber, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan, dan peran dalam menghadapi goncangan dan tekanan sosial.

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketidak adaan suatu kondisi tidak dapat terpenuhi ketubuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang . Beberapa definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Deepsos, 2002).

Definisi kemiskinan juga bersifat kompleks, ole karena itu parah ahli mengklarifikasinya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu:

1. Kemiskinan alamia, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah.

Membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian. Kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.

2. Kemiskina kultural, kemiskinan ini terkait erat dengan sikap seseorang atau kelomok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membutuhkannya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sering kali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan, kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin pada sumber-daya daya pembagunan yang ada. (Indar, kompas online, 2007).
4. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telahdisebabkan berkurangnya kelompok mayarakat tertentu dalam kemiskinan, yang bahkan berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak lah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperhatikan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusiannya, seperti yang digambarkan paada kemiskinan secara kultural dan institusi dalam masyarakat. Kemiskinan alami ole petani dipedesaan selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian. Kemiskinan struktural diwilayah pedesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya (Soedjatmoko, 2004; 46-61).

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinannya (cox 2004; 1-6), yaitu

1. Kemiskinan yang dilakukan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara maju, sedangkan negara-negara berkembang terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi

wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah pedesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminatif, atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konskuensi. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Definisi kemiskinan yang digunakan dalam melihat peningkatan pendapat rumah tangga petani miskin adalah kemiskinan struktural dengan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan struktural dengan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan kondisi kemiskinan yang dialami petani tidak terlepas dari kebijakan pembangunan khususnya sektor pertanian yang diterapkan oleh pemerintah, dan pemenuhan kebutuhan dasar

merupakan pendekatan yang lebih bisa menggambarkan secara menyeluruh kondisi kemiskinan yang di alami petani.

2.3.2 Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkatkemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikatorkemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010). Indikator kemiskinanyang dimaksud adalah :

- a. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- b. Akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- c. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya

fasilitas pendidikan,rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.

- d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnyakesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha,perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak danpekerja perempuan.
- e. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yangdigunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
- f. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalahsulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, danrendahnya mutu sumber air.
- g. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah strukturkepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan danStrategi untukpenguasaan tanah.
- h. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakanadalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam.Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

- i. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidakterjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupunekonomi.
- j. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnyaketerlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- k. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakupkeseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanyakemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehinggadiperlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang dikemukan oleh Komite penanggulanganKemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik dalam melihat kondisi kemiskinan yangdialami masyarakat. (Syahyuti, 2006 : 95).

2.4 Teori Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) ,berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utamapemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaanseringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukanaapa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosialtradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak

terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak terisolasi dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah.

Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan
- f. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan
- g. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
Reproduksi
- h. kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.

2.4.1 Pengembangan Masyarakat

Apabila tujuan pengembangan masyarakat adalah tercapainya peningkatan kualitas manusia (bukan sekedar pemenuhan materi yang menjadi kebutuhannya, maka perubahan yang diharapkan terjadi dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus dapat menyentuh aspek perubahan kualitas.

Untuk menjangkau perubahan kualitas manusia tersebut maka pendekatan pengembangan masyarakat harus menggunakan pendekatan pembelajaran masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat,

membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Kerjasama dalam sebuah pengembangan masyarakat dengan pendekatan antara lain dapat dilakukan dalam keseluruhan tahapan-tahapan pengembangan yang meliputi: Menemukan masalah dalam masyarakat, menyusun perencanaan, merumuskan tujuan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan, mengevaluasi hasil (pemenuhan minat, kebutuhan, dan pencapaian nilai-nilai).

Lebih bersifat pemberian dan atau penataan pengalaman mereka. Jika yang disampaikan dalam proses pengembangan tersebut adalah kegiatan praktek, maka subyek yang melakukan pengembangan hendaknya memilih metode yang menekankan pada perbaikan kualitas dan semangat kerja, peningkatan produktivitas kerja, ketepatan penggunaan alat dan pengembangan ketrampilan baru.

Kesehatan ialah tanggungjawab manusia dan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pembangunan kesehatan yang tertulis dalam Sistem

Kesehatan Nasional adalah “Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional”. Dalam Sistem Kesehatan Nasional dirumuskan tujuan utama pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang dikenal dengan Panca Karsa Husada. Butir pertama, yang menjadi dasar untuk empat butir berikutnya, ialah “peningkatan kemampuan masyarakat yang menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan”. Untuk mencapai tujuan jangka ini diadakan berbagai upaya secara keseluruhan disebut pelayanan kesehatan. Supaya upaya pelayanan kesehatan ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan baru maka pelayanan kesehatan ini mutlak memiliki dua sifat yaitu komplementer dan edukatif.

Pelayanan kesehatan dimaksud untuk membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam kesehatan. Yang sudah dapat dilakukan oleh masyarakat tidak boleh diambil oleh pelayanan kesehatan. Hanya bila kemampuan masyarakat belum memadai pelayanan kesehatan harus membantu. Supaya masyarakat bisa mandiri, pelayanan kesehatan tidak boleh menimbulkan sifat ketergantungan.

Selain itu setiap tindakan yang diambil harus mempunyai sifat edukatif, dengan arti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat melakukan yang sekarang masyarakat belum mampu. Dengan demikian

pelayanan kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat makin sedikit membutuhkan bantuan.

Pendidikan orang dewasa harus bekerja dalam setiap cara untuk mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang informil di dalam masyarakat, menolong mereka tumbuh dewasa, mempersiapkan mereka untuk menerima tugas-tugas yang menantang, untuk menolong mereka melihat hubungan antara masalah-masalah mereka dan kelompok-kelompok lainnya dan menolong mereka memahami keuntungan mengadakan kerja di dalam memecahkan problem-problem masyarakat.

2.5 Pendamping

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelolaan kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non provit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan.

Suharto (2005, h. 93) mengemukakan bahwa pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh karena dan untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan dalam pedoman umum penyuluhan kehutanan bahwa pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi dilapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktifitas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya. (pedoman umum kehutanan,2004,h.2)

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar

masyarakat yang di dampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2.6 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya didalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dasar pelaksanaan PKH yaitu keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua koordinasi penanggulangan kemiskinan, No : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan”

PKH mulai dilaksanakan di indonesia pada tahun 2007, PKH ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Sasaran dari PKH didalam bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki anak balita, anak Pra sekolah, dan para komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah

setingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sederajat atau yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Menjadi penerima bantuan jadi, pada kartu kepersetaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

PKH diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban ekonomi dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antra generasi (pedoman umum PKH, 2006:25).

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH membererikan bantuan secara tunai kepada RTSM, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait denga upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikn dalam kesehatan.

Tujuan utama dalam PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada pada kelompok masyarakat miskin. Alam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun peningkatan secara khusus, tujuan dari PKH (Pedum PKH 2008, h.12) terdiri dari :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM

UUD 1945 pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara program keluarga harapan adalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam melihat fakir miskin dan anak terlantar, memelihara dalam artian luas tidak sekedar menampung mereka dalam satu tempat tapi negara harus hadir memelihara fakir miskin atau anak terlantar. Dengan pendamping dan pemberdayaan.

Landasan hukum pemberian PKH adalah UU no 40 tahun 2002 tentang sistem jaminan sosial UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Peraturan presiden no 15 tahun 2010 tentang percepat penanggulangan kemiskinan. Impres no 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan. Inpres no 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta PKH.

2.6.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kata “kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1991) bersal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, dan makmur sedangkan pengertian dari kesejahteraan itu

sendiri adalah hal atau keadaan aman, damai, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan dapat di artikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan oarang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan hatinya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya dan ia merasa terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan suatu bangsa. Tingkat kesehatan, pendidikan, perokonomian yang perlu diperhatikan. Program PKH yang dicanangkan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat y. Bagi keluarga yang dalam keadaan kurang mampu untuk memenuhu kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi sebuah tantangan besar. Tingginya biaya transportasi, baik peralatan sekolah dan layanan kesehatan sering terlalu tinggi untuk mereka jangkau, terkadang yang menjadi alasan orang tua hanya membeli obat-obatan warung untuk anaknya ketika sedang sakit, namun hal ini justru berakibat pada jumlah kehadiran anak tersebut disekolah karena sakit yang tak kunjung sembuh

berdampak pada kinerja anak sehingga memperkecil peluang untuk lulus, yang ada akhirnya membuat mereka terjebak dalam sebuah rantai kemiskinan.

Karena inilah pemerintah melalui Kemensos mengeluarkan sebuah program yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai solusi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH sendiri merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung tunai kepada RTSM dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program ini sangat mulia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan kesehatan dan gizi para peserta PKH sehingga dapat mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan maerial, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan yang lebih baik dari sebelumnya.

2.6.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan kedisabilitasnya dari pihak lain terutama pengasuh dan perawat dari keluarganya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

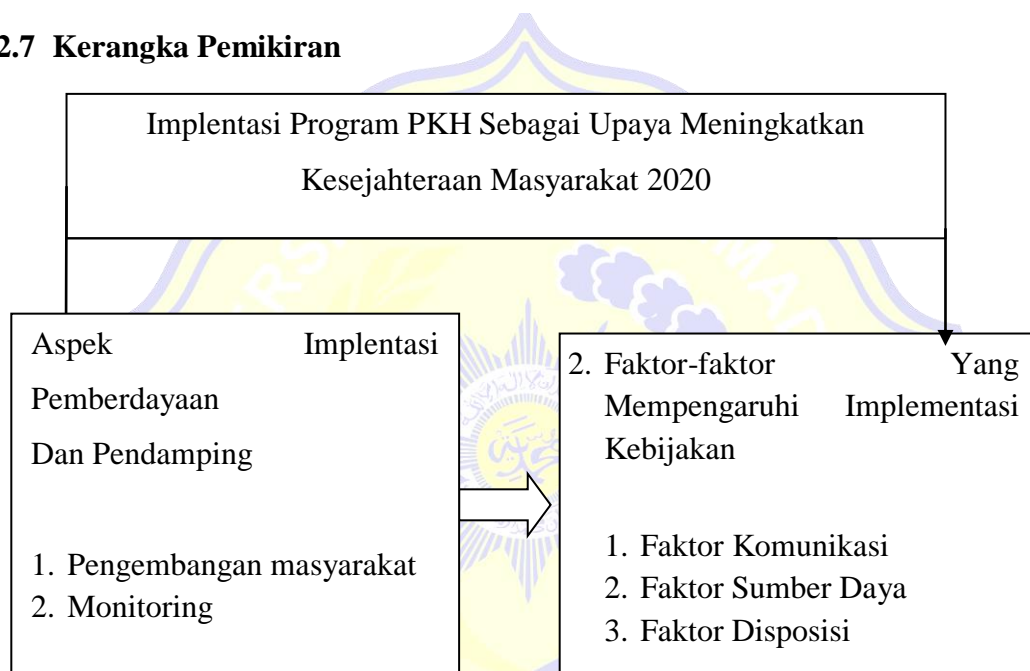
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial.

2. Lanjut usia

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas, secara fisik, lanjut usia dapat dibedakan menjadi lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Presentasi lansia semakin meningkat setiap tahunnya, semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

Tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia ditemukan pada penduduk lanjut usia dengan tingkat yang sangat tinggi pada usia yang paling tua sehingga implementasinya diperlukan sinergi lintas sektor dalam penanganan lanjut usia dan penyandang disabilitas miskin berdasarkan status tinggal, Bantuan PKH diberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga.

2.7 Kerangka Pemikiran



2.8 Definisi Konseptua

1. Implementasi

pengertian dari pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang)

2. Program PKH

PKH atau program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian aung non tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTM).

2 Meningkatkan

Adalah mengangkat diri atau meningkatkan atau menaikkan (derajat, taraf dan sebagainya).

3 Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga memiliki rasa puas akan hasil yang diperoleh dari hasil konsumsi pendapatan

2.9 Definisi Operasional

1. Alur pelaksanaan PKH terdapat 3 bagian pokok, yaitu :

a. Pengembangan masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas hidup anggota
- 2) Meningkatkan penghasilan anggota

b. Monitoring

- 1) Evaluasi

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

a. Faktor Komunikasi

- 1) Kejelasan
- 2) Konsistensi

b. Sumber Daya

- 1) Sumber daya Manusia
- 2) Sumber daya anggaran

c. Disposisi

- 1) Sika

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini juga tidak hanya mengungkapkan peristiwa yang nyata namun lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Penelitian kualitatif juga digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, penelitian ini menyajikan secara langsung dasar pertimbangan, *kedua*, penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong,2012:6). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi program PKH sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desaa kale,o kecamatan lambu kabupaten bima tahunn 2020. Melalui proses wawancara mendalam dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya diperoleh peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di desa kale'o kecamatan lambu kabupaten bima provinsi nusa tenggara barat (NTB). Lokasi penelitian ini dipilih karena tempatnya yang cukup mudah untuk di jangkau dan sumber-sumber informan ataupun data-datanya mudah di akses/ dapat sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 bulan mulai pada bulan november sampai januari 2021

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sample. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, teknik sampling yang digunakan yaitu Nonprobability Sampling merupakan teknik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Teknik sample ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Jabatan
1	Endang Fitriani S.pd	Pendamping PKH
2	Nurul Akbar, SE	Kepala desa kale'o
3	Imran	Kesra desa kale,o
4	7 orang penerima bantuan	PKM

(sumber data sekunder kantor desa kale'o)

3.5 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini harus terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, Oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengetahui implementasi program PKH sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2020 di desa kale'o kecamatan lambu.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data utama yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti baik dengan menggunakan teknik observasi maupun wawancara (sugiono, 2004:225). Dalam penelitian data primer yang didapat melalui teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan terkait isu masalah dalam penelitian kepada informan-informan yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa surat kabar, website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, referensi-referensi yang terkenal.

3.7 Teknik pengumpulan Data

1. Obsevasi

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi

partisi pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan arsip tertulis mengenai berbagai informasi tertentu yang berupa surat kabar, website, dokumen atau teks, perundang-undangan berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto dalam Suwartono, 2014:73.) teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui peninggalan/ arsip tertulis yang berkaitan dengan implementasi program PKH. Studi dokumen bisa disebut pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang dapat membantu peneliti mengumpulkan informasi yang berkenaan untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi program PKH.

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis data kualitatif menurut Moeleong (2005:248)

adalah upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, menceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi secara lapangan secara objektif.

2. Reduksi Data

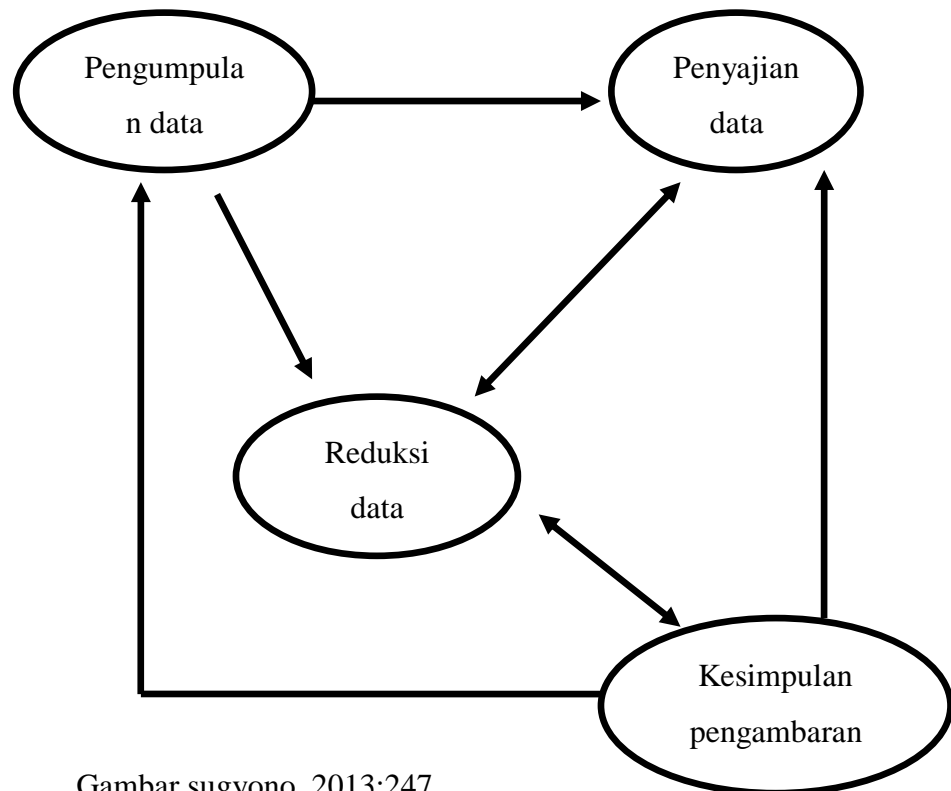
Data yang diperoleh dari lapangan dan dituangkan kedalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari pola dan temanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

3. Penyajian data (*Display data*)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada tahap *display data* adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara kedalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan.

4. Mengambil kesimpulan

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat sekumpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian (moeleong, 2005:249).



Gambar sugyono, 2013;247